

Konstruk Identitas Sosial *Ulun Lappung* dalam Upaya Identifikasi Konflik di Lampung

Wahyu Setiawan^{1*}, Sainul², Aprida Kurnia Lestari³

^{1,2} Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia

³ Universitas Islam An Nur Lampung, Indonesia



wahyu.setiawan@metrouniv.ac.id*

Abstract

Social identity is a dynamic, fluid, and multi-faceted reality. Identity formation does not occur linearly but through social processes that are constructed and deconstructed. *Ulun Lappung*'s social identity as an ethnified indigenous community is no exception. Cultural encounters between ethnicities in this area have required *Ulun Lappung* to redefine its social identity. The process of constructing the social identity of *Ulun Lappung* in an inter-ethnic context both internally and externally is the main focus of this article. Research data was collected through in-depth interviews with traditional leaders and Lampungese communities in the Sekampung Udik sub-district with a typology of four groups, namely: first, people of different ethnicities in one village but separated in sub-villages; second, different villages but directly adjacent between ethnicities; third, people who are together in one village and sub-villages; and fourth, people who are separated in villages, sub-villages, and even sub-districts. This study urges that the identity construct of *Ulun Lappung* in inter-ethnic social contestation with migrant communities shows a defensive identity model. No modification, manipulation, or assimilation of identity when they meet in the social sphere with immigrant communities. The inter-ethnic contestation leads *Ulun Lappung* to form a new identity, called resistance identity.

Keywords: Social Identity, *Ulun Lappung*, *Piil Pesenggiri*

ARTICLE INFO

Article history:

Received
February 22nd,
2024

Revised
June 05th, 2024

Accepted
June 16th, 2024

Published by
Website

This is an open access article under the CC BY SA license

Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah
<http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/tapis/index>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Keragaman etnik dalam struktur sosial pada dasarnya merupakan modal budaya dalam hubungan yang saling memberi dan menerima. Namun, heterogenitas dapat pula melahirkan konflik ketika terjadi kontestasi sosial antar etnis yang tidak berimbang. Fenomena inilah yang terjadi di Lampung sehingga menjadikannya sebagai propinsi yang mempunyai tingkat kerawanan konflik horizontal yang tinggi. Hampir di seluruh kabupaten pernah mengalami konflik komunal dengan basis etnis yang melibatkan penduduk asli Lampung (*ulun Lappung*) dan pendatang. Terlihat jelas bahwa migrasi dalam perspektif kontemporer memberi sumbangan kepada besarnya kompleksitas suatu fenomena dan mempertajam perbedaan etnik dan agama dalam banyak masyarakat (Castells, 2003: 40).

Doi <http://dx.doi.org/10.32332/tapis.v8i2.9054>

ISSN Print 2579-3233; Online 2580-068X

Volume 8 Number 2, June 2024, page 138-153

Realitas pergumulan antar-etnis di Lampung memperlihatkan proses *prejudice* ke arah pembentukan *stereotype* yang berujung pada *stigma* antar etnis. Hal ini memperlihatkan adanya proses konstruksi identitas kolektif *ulun Lappung*. Konstruksi identitas sosial masyarakat Lampung menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut mengingat adanya pergeseran nilai (*values shift*) dalam pembentukan identitas pada masyarakat itu sendiri. Pada dasarnya, etnis Lampung memiliki modal kultural yang bersifat inklusif. *Local genius* seperti *nemui nyimah*, berupa sikap terbuka memberikan pengaruh terhadap terbentuknya karakter sosial yang majemuk. Bahkan penerimaan *ulun Lappung* terhadap kolonis Jawa dengan pemberian tanah *ulayat* merupakan implementasi dari nilai adat tersebut.

Pergeseran nilai dalam pembentukan identitas baik individual maupun kolektif memperlihatkan bahwa identitas sosial merupakan realitas yang bersifat dinamis, cair, dan berlapis. Masyarakat etnis Lampung harus mendeskripsikan identitasnya berupa ikatan sosial dengan budaya leluhur demi kelestarian dan legitimasi identitas ke-Lampung-annya. Pada sisi lain, mereka juga harus mendeskripsikan identitas sosial dari masyarakat di wilayah yang telah mengalami perbauran budaya dan fakta bahwa secara kuantitas mereka semakin terpinggirkan.

Konstruksi identitas sosial akan memperlihatkan sudut pandang dan cara pandang sebuah masyarakat terhadap dirinya (*insider*) dan masyarakat *liyan* yang berada di luar komunitasnya (*outsider*). Kajian terhadap pembentukan identitas masyarakat Lampung dalam konteks komunikasi antar budaya terutama antar etnik Lampung-Jawa menjadi sangat urgen dan bermanfaat dalam upaya identifikasi anatomi konflik komunal yang sering terjadi di wilayah Lampung.

Pokok masalah yang akan dikaji dalam artikel ini adalah proses pembentukan identitas sosial *ulun Lappung* dalam kerangka identifikasi konflik yang sering terjadi. Sehingga meniscayakan kajian mendalam tentang aspek-aspek dalam proses pembentukan identitas, faktor-faktor yang mempengaruhi, bentuk manifestasi identitas yang telah terkonstruksi, dan upaya pelestarian identitas baik pada ranah internal maupun eksternal. Persoalan utama ini diikuti oleh pertanyaan yang lebih spesifik yaitu bagaimana proses pembentukan identitas *ulun Lappung* sebagai modal budaya dalam interaksi antar masyarakat Lampung?; dan bagaimana konstruksi identitas *ulun Lappung* dalam kontestasi sosial antar etnis?

Konstruksi Identitas: Sebuah Tinjauan Teori

Identitas merupakan sumber makna (pemaknaan) dan pengalaman orang. Konstruksi diskursif yang berubah maknanya menurut ruang, waktu, dan pemakaian (Bakker, 2005: 171). Sehingga identitas merupakan hasil sebuah konstruksi sosial. Dengan kata lain, identitas bukanlah sesuatu yang mapan dan ditakdirkan melainkan pemaknaan yang dibentuk dengan kesadaran melalui sebuah proses sosial. Proses konstruksi makna tersebut didasarkan atas sebuah atribut kultural atau terkait dengan seperangkat atribut kultural. Hal inilah yang menyebabkan identitas bersifat majemuk. Identitas dapat mewujudkan sebagai *self-representation* maupun *social action*.

Castells (2000: 3) berpendapat bahwa identitas yang berasal dari kelompok sosial dominan dapat menjadi identitas ketika dan jika ada proses individuasi oleh struktur sosial yang terkait dengan kondisi lokal maupun global. Individuasi struktur sosial dilakukan melalui konstruksi makna dalam proses internalisasi nilai. Proses tersebut berujung pada pembentukan identitas kolektif.

Proses konstruk identitas melalui internalisasi nilai memungkinkan terjadinya fusi (*peleburan*) identitas dalam suatu situasi atau konteks, atau juga melingkupi (*encompassment*) berupa proses memasukkan yang lain (*other*) menjadi bagian dari diri (*self*). Ketika proses peleburan itu terjadi, maka sangat dimungkinkan pula terjadinya orientalisasi (*orientalization*) ketika setiap subjek yang mengidentifikasi diri memiliki “kesamaan yang terbaik” dalam menciptakan suatu representasi yang ideal (Baumann dan Gingrich, 2004: 21). Pembentukan identitas dalam kerangka ini dilakukan dengan berbagai strategi atas simbol-simbol material untuk membentuk afiliasi baru dan di mana implikasi dari identitas ini dipertimbangkan sebagai bagian dari perubahan sosial (Schortman, 2001: 315).

Teoretisasi Castells nampak bermuara pada masyarakat jaringan dengan identitas kolektif (*collective identities*). Hal ini dikarenakan bahwa di dalam masyarakat jaringan pemaknaan individu melewati ruang dan waktu terpintal dalam sebuah jaringan. Tanpa mengabaikan fakta bahwa identitas kolektif tersebut merupakan kumpulan dari identitas individu. Bahan-bahan konstruksi tersebut berasal dari sejarah, geografis, *collective memory*, fantasi personal, dan konsepsi keagamaan (Castells, 2000: 7).

Kenyataan bahwa identitas kolektif merupakan pintalan dari identitas individu, Burke dan Stets (2009: 6-13) melakukan spesifikasi kajian terkait konstruk identitas yang difokuskan pada identitas individu. Melalui basis teori interaksionis-simbolik, ia menyatakan bahwa agen sosial dan struktur sosial merupakan faktor dominan pada pembentukan identitas individu (personal). Terutama agen atau aktor dan struktur yang sangat mempengaruhi individu tersebut. Terlihat dengan jelas bahwa identitas kolektif tentu saja berhulu pada identitas individu. Terutama agen atau aktor dan struktur yang sangat mempengaruhi individu tersebut.

Terlihat dengan jelas bahwa identitas kolektif tentu saja berhulu pada identitas individu. Identitas sosial dengan demikian merupakan bagian dari konsep diri individu yang berasal dari pengetahuannya tentang keanggotaan dalam struktur sosial. Tentu saja hal ini dipengaruhi oleh signifikansi nilai dan emosional dari keanggotaan tersebut. Lebih lanjut, Tajfel (1982: 3) menyatakan bahwa identitas sosial berkaitan dengan keterlibatan, rasa peduli, dan juga rasa bangga dari keanggotaan dalam suatu kelompok tertentu. Senada dengan Tajfel, Appiah (2005: 24) menyatakan bahwa satu nilai universal dari identitas adalah solidaritas. Nilai solidaritas pada satu sisi memunculkan motivasi dalam pemaknaan untuk melakukan kebaikan internal komunitas identitas tersebut. Namun memiliki efek negatif ketika difungsikan dalam struktur sosial yang memperhadapkan dua identitas yang kontra-produktif yang berakibat di akar rumput. Solidaritas dari proses identitas turut menciptakan ukuran, parameter, sekaligus batasan sosial ketika berhadapan dengan identitas kolektif yang berbeda yang dapat berakibat pada krisis komunal. Di sinilah identitas kolektif dapat melahirkan subordinasi *liyan*.

Instrumen utama yang digunakan dalam melihat relasi individu, agen, dan struktur sosial dalam konstruk identitas berupa analisis terhadap tiga konsep sentral yang menjadi fondasi interaksionis-simbolik. Ketiga konsep tersebut berupa *self* (kedirian), *language, sign and symbol* (bahasa, tanda, dan simbol), dan *interaction* (interaksi) (Appiah, 2005: 9-14). Dalam proses itu, maka formasi dan konstruksi identitas tidak pernah mengalami keajegan. Terdapat situasi dan peristiwa yang membuat formasi dan konstruksi identitas tampak tunggal, tetapi juga ada kalanya plural. Hubungan timbal balik konstruk identitas individu dan identitas kolektif menurut Côté (2002: 7-8) melibatkan tiga proses utama dalam kajian sosiologi, yaitu: *socialization, social control*, dan *internalization*.

Teoretisasi tersebut terlihat juga menggunakan teori struktur sosial, agensi, dan interaksi simbolik seperti yang dilakukan Burke. Perbedaan Côté adalah upayanya mengakarakan diri pada psikoanalisa sebagai pionir teori identitas seperti yang dikembangkan Erickson. Teori ini berangkat dari titik sentral konsep *self* yang dibangun Freud. Upaya teoretisasi Côté kemudian berlanjut dengan konsep sintesis antara psikoanalisa dengan psikologi sosial. Teoretisasi Côté terhadap *identity formation*, *agency*, dan *culture* didasarkan pada hubungan saling mempengaruhi antara *social culture*, *interaction*, dan *personality*. Di dalam hubungan tersebut terdapat tiga aspek dominan yaitu *socialization*, *social control*, dan *internalization*. Timbal balik antara *identity formation*, *agency*, dan *culture* juga menampilkan di dalamnya *presentation of self* sekaligus *social construction of reality*. Teoretisasi Côté dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Teoretisasi Côté

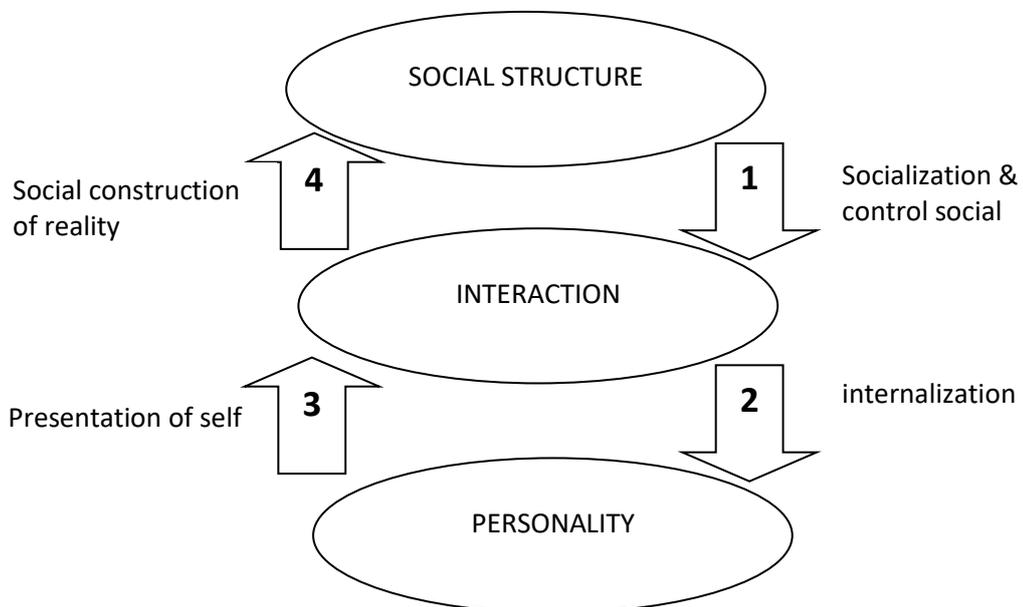


Diagram di atas memperlihatkan tiga tingkatan analisis termasuk hubungan antar tingkat analisis tersebut. Ditandai dengan empat anak panah yang menunjukkan ketersaling-pengaruh pada ketiga tingkat analisis tersebut. Pengaruh struktur sosial terhadap proses interaksi sehari-hari yang melibatkan proses sosial dan proses kontrol sosial ditunjukkan oleh anak panah 1. Anak panah 2 menunjukkan bagaimana paparan interaksi sehari-hari dengan orang lain memuncak dalam internalisasi norma dan nilai-nilai struktur sosial yang dimediasi oleh kemampuan sintesa ego seseorang. Panah 3 menggambarkan kemampuan eksekutif ego seseorang dalam menghasilkan presentasi diri. Terakhir pada panah 4 bahwa orang tersebut terlibat dalam interaksi sehari-hari dengan orang lain sebagai konsekuensi penting dari konstruksi sosial terhadap realitas (Cote dan Levine, 2002: 7-8). Konstruksi inilah yang disebut Berger dan Luckmann sebagai *objectivation*. Melalui proses berulang ini, dapat terlihat apakah struktur sosial dipertahankan atau diubah, interaksi bersifat normal atau terganggu, begitu juga kepribadian baik dalam taraf individu maupun kolektif dibentuk atau diubah.

Teoretisasi tentang konstruk identitas inilah yang digunakan artikel ini dalam melihat proses pembentukan identitas masyarakat Lampung dalam menarasikan diri dan kelompoknya dalam kerangka perjumpaan dan dialog kebudayaan antar etnis.

METODE

Artikel ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan *locus* Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur fokus pada Desa Bojong. Sumber data primer terdiri dari tokoh adat dan masyarakat Lampung. Tipologi masyarakat yang digunakan terbagi menjadi empat kelompok, yaitu: *pertama*, kelompok masyarakat yang berbeda etnis dalam satu desa namun terpisah dalam dusun-dusun; *kedua*, berbeda desa namun berbatasan langsung antar etnis; *ketiga*, masyarakat yang berbaur dalam satu desa dan dusun; dan *keempat*, masyarakat yang terpisah desa, dusun, bahkan kecamatan. Sedangkan sumber sekunder berupa dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis kualitatif yang terdiri dari analisis domein dan taksonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruk Internal Budaya *Ulun Lappung*: Kontestasi Pembentukan Identitas

Kabupaten Lampung Timur sebagai wilayah penelitian ini dalam perjalanan sejarahnya menjadi salah satu arena pertemuan kebudayaan, tradisi antara masyarakat pendatang (sebagian besar masyarakat transmigran Jawa) dan masyarakat pribumi (*ulun Lappung*). Sehingga untuk dapat melihat realitas saat ini terkait relasi antar penduduk pribumi dengan masyarakat pendatang di Lampung Timur tidak dapat terlepas dari sejarah migrasi yang terjadi pada masa kolonial Belanda pada Propinsi Lampung secara umum.

Perspektif historis perpindahan penduduk dari Jawa ke Sumatera, termasuk di wilayah Lampung Timur khususnya merupakan manifestasi kebijakan politik etis Pemerintah Hindia-Belanda. Politik balas budi bertumpu pada trilogi yang digagas van Deventer berupa irigasi, edukasi, dan migrasi (Bani, 2013: 4). Trilogi yang pada dasarnya dengan semangat balas budi inipun pada tataran praktis dimanfaatkan untuk kepentingan sistem kapitalisme pihak kolonial. Irigasi lebih diarahkan pada wilayah perkebunan besar milik pemerintah Hindia-Belanda, edukasi melalui pendirian sekolah-sekolah ditujukan untuk menciptakan tenaga administrasi rendahan, dan migrasi difokuskan pada wilayah yang memiliki perkebunan besar pemerintah sebagai tenaga kuli kontrak dengan gaji yang sangat minim. Tujuan migrasi dari kebijakan politik etis tersebut salah satunya adalah Lampung. Kebijakan migrasi itulah yang disebut dengan program kolonisasi.

Kolonisasi di Lampung pertama kali dimulai pada tahun 1905. Penempatan pertama dilakukan 155 KK yang berasal dari daerah Kedu Jawa Tengah. Tujuan utamanya adalah Kampung Bagelen Gedong Tataan, 25 km arah Barat Kota Bandar Lampung. Dari tahun 1905 hingga tahun 1943 di Provinsi Lampung telah ditempatkan transmigran sebanyak 51.010 KK atau 211.720 jiwa di kawasan Gedong Tataan, Gadingrejo, Wonosobo Lampung Selatan, dan kawasan Metro, Sekampung, Trimurjo dan Batanghari.

Berdasar keberhasilan penempatan pertama tersebut kemudian pada tanggal 12 Desember 1950, sebanyak 23 KK dengan 77 jiwa transmigran ditempatkan di Provinsi Lampung melalui pola Trans Tuna Karya, Trans Bencana Alam dan Trans Pramuka.

Pada periode 1950 – 1969 penempatan transmigran ke Provinsi Lampung 53.263 KK atau sebanyak 221.035 jiwa dengan Pola Tanaman Pangan. Total perpindahan penduduk ke Provinsi Lampung melalui program transmigrasi dari tahun 1905 hingga tahun 1969 sejumlah 104.273 KK atau 432.755 jiwa. Program ini diduga menjadi pintu masuk pertemuan antara pendatang dan *ulun Lappung* yang pada akhirnya melahirkan sebuah multikulturalitas suku, budaya dan agama yang ada di Lampung Timur, begitu juga Kecamatan Sekampung Udik. Tumbuh suburnya multikulturalitas di kecamatan ini disebabkan adanya rasa keberterimaan dan kerelaan hati dari para tetua-tetua adat Kemandaran Marga Sekampung Udik Limo Megou yang berpusat di Desa Gunung Raya. *Ulun Lappung* pada wilayah ini telah “menghibahkan” tanah marga atau tanah pusaka leluhur mereka kepada para saudara barunya (pendatang; kolonis) yang datang dari tanah sabrang. Munculnya sikap tersebut karena semata-mata bentuk kearifan dan keluhuran mereka dalam mentaati falsafah hidup *Sakai Sambayan* sebagai salah satu identitas etnik *ulun Lappung*.

Membicarakan identitas *ulun Lappung* mestinya harus didasarkan pada pemahaman tindakan manusia dalam konteks sosialnya. Jika yang dibicarakan adalah identitas *ulun Lappung* maka harus dikupas persamaan dan perbedaan, soal personal dan sosial, soal apa yang kamu miliki secara bersama-sama dengan beberapa orang dan atau apa yang membedakanmu dengan orang lain (Barker, 2000: 221). Selain itu, ketika membicarakan identitas, maka secara otomatis juga membincangkan tentang kelompok. Kelompok sosial di sini dimaknai sebagai suatu sistem sosial yang terdiri dari sejumlah orang yang berinteraksi satu sama lain dan terlibat dalam satu kegiatan bersama atau sejumlah orang yang mengadakan hubungan tatap muka secara berkala karena mempunyai tujuan dan sikap bersama; hubungan-hubungan yang diatur oleh norma-norma; tindakan-tindakan yang dilakukan disesuaikan dengan kedudukan (status) dan peranan (*role*) masing-masing dan antara orang-orang itu terdapat rasa ketergantungan satu sama lain (Ibrahim, 2003: 64).

Di manapun tempatnya berada, *ulun Lappung* dalam berinteraksi tidak terlepas dari aturan adat yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Baik ketika sedang berinteraksi dengan diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. *Ulun Lappung* termasuk masyarakat yang sangat kuat dalam memegang dan memelihara adat. Mereka telah memiliki konsep kesesuaian yang kemudian dikenal sebagai bentuk karakter-karakter yang dimiliki oleh individu. Dalam konteks individu, di sinilah terletak jika segala sesuatu—termasuk perbuatan, tindak-tanduk dan tutur kata—oleh *ulun Lappung* selalu diperhatikan secara seksama atau dipertimbangkan masak-masak. Sebab, jika berlebihan akan mendapat sanksi adat karena perbuatan tersebut dapat merugikan atau mengganggu orang lain.

Dalam konteks *ulun Lappung* secara umum dan khususnya di Marga Sekampung Udik Limo Megou yang beradat Lampung Saibatin, filosofi *piil pesenggiri* telah menjadi dasar pijakan perilaku dalam berinteraksi dengan sesamanya. Bandar Marga Sekampung Udik Limo Megou, H. Zubir Gelar Pengeran Kesumo Ratu menuturkan:

Piil pesenggiri itu pendirian orang Lampung. Pendirian mempertahankan hak. Piil pesenggiri itu dibangun dari lima unsur, nemui nyimah suka memberi saudaranya, nengah nyappur artinya orang Lampung itu suka bergaul dengan siapa saja, sakai sambaian suka menolong juga gotong royong, bejuluk beadok, dan ragam mufakat (Zubir, wawancara, 10 Februari 2020).

Piil pesenggiri merupakan modal budaya yang luhur bagi kehidupan *ulun Lappung*. Asas bangunan *piil pesenggiri* berdiri kokoh pada lima konsep adiluhung

yang terus dipelihara dan dilestarikan hingga generasi millennial. Tim peneliti awalnya berasumsi bahwa filosofi hidup *ulun Lappung* ini hanya berada pada aras konseptual dan dikuasai oleh para tokoh adat (*punyimbang*). Sehingga diskusi tentang *piil pesenggiri* kemudian ditelusuri hingga pada generasi muda *ulun Lappung*. Wawancara kemudian dilakukan terhadap beberapa generasi muda Lampung yang salah satunya menjelaskan demikian:

Bagi kami sebagai pemuda Lampung, piil pesenggiri menjadi salah satu warisan budaya dalam bersikap. Untuk sekarang, pas ada yang nikah, rata-rata sekaligus begawi untuk mendapatkan gelar. Itu salah satu dasar piil pesenggiri...juluk adok. Gitu juga nengah nyappur, sakai sambaian. Inilah saatnya kita untuk menjaga warisan tradisi orang-orang tua dulu (Arif, wawancara, 7 Maret 2020).

Pernyataan senada juga disampaikan oleh beberapa pemuda yang diwawancarai Tim Peneliti (Muhammad, Ali, Hasan, wawancara, 7 Maret 2020). Terlihat bahwa pandangan *ulun Lappung* terhadap adat istiadat yang berlaku turun temurun sangat positif. Pranata adat tetap fungsional bahkan hingga generasi muda. Terutama pada *ulun Lappung* yang berada pada tempat asal dan dalam komunitas Lampung itu sendiri. Bahkan pada tingkat generasi muda, kesadaran untuk kembali ke adat terlihat menguat. Sebut saja tradisi *begawi*, semakin menjadi perhatian dan sering dilaksanakan dalam prosesi perkawinan *ulun Lappung*. Bahkan Tim Peneliti ketika dalam perjalanan riset ke Desa Bojong menyaksikan beberapa peristiwa *begawi* yang dilaksanakan *ulun Lappung* ketika melangsungkan resepsi perkawinan.

Begawi merupakan acara adat yang sangat penting dalam kehidupan adat Lampung. *Begawi* adalah satu prosesi sebagai fase perubahan status sosial yang ditandai dengan pemotongan sapi atau kerbau. Prosesi ini menjadi gerbang baru bagi *ulun Lappung* untuk memperoleh status dalam sistem sosial yang ditandai dengan pemberian gelar adat. Pemberian gelar merupakan pengejawantahan filosofi *bejuluk-beadok* sebagai salah satu pilar *piil pesenggiri* (Minak Paku, wawancara, 28 Februari 2020).

Realitas menguatnya kembali peran adat dalam kehidupan *ulun Lappung* memperkuat tesis Irianto yang menegaskan bahwa pemaknaan kembali *piil pesenggiri* bagi masyarakat Lampung merupakan kesadaran kolektif dalam reposisi identitas etnik. Irianto menyebutnya *reinvented tradition* sebagai modal budaya sekaligus strategi budaya sebagai bentuk resistensi terhadap masyarakat pendatang (Irianto, 2011: 140-150). Meskipun kemudian dalam tataran praktis pemaknaan dan internalisasi adat Lampung bagi *ulun Lappung* sekarang mengalami penyederhanaan praktik adat yang terjadi. Misalnya pada acara *begawi* yang pada masa lalu dilaksanakan hingga tujuh hari tujuh malam. Pada masa sekarang disederhanakan dengan meninggalkan beberapa kelengkapan *begawi*. Ada banyak faktor yang melatari tindak kolektif *ulun Lappung* tersebut. Di antaranya tuntutan modernitas yang mengarah pada pragmatisme untuk mempersingkat prosesi tanpa meninggalkan adat. Apalagi ditunjang adanya kelonggaran dalam adat Lampung Marga Sekampung Udik Limo Megou yang memberikan peluang bagi *ulun Lappung* untuk meninggalkan beberapa prosesi meskipun harus diganti dengan denda adat (Hasanuddin, wawancara, 7 Maret 2020).

Pola Konstruksi Identitas *Ulun Lappung* dalam Komunikasi Budaya Antar Etnis

Kalau di Bojong ini....kalau yang sudah rame masuk itu sekitar tahun 57, yang banyak Jawa Tengah. Kalau yang Jawa Barat, bangsa Sunda, Banten itu bukan gak ada, tapi kurang. Kalau Bali di Bojong ini gak ada. Kalau daerah

Pugung ke sana di daerah dalam ada. Pugung Raharjo sekarang itu dulunya termasuk Bojong. Kampung-kampung Jawa sekarang rata-rata pecahan dari kampung Lampung awal. Bahkan pada awal sekali, orang Jawa ke sini memang diberi tanah adat. Ada juga yang memang dibawa orang Lampung untuk menetap di sini. Orang Lampung yang membawa mereka memberikan tanahnya kepada para pendatang (Kausar, wawancara, 3 Maret 2020).

Pinggir-pinggir jalan ini, yang tua-tua kampung Lampung. Tuba..di sini perempatan Bandar Agung Salai ini orang Banten. Ngumpulnya di dalam sana, tapi lama-lama bikin jalan, terus penduduknya dari Banten nambah nambah terus, minggir sampai perempatan. Jalan yang itu, Banten..Beli, beli sedikit itu. Orang Jawa begitu juga. Beli tanahnya dari orang Lampung. Orang Lampung jual tanah ya karena macam-macam. Ada yang pernah kalah judi, ada yang kurang makan, ada yang pernah pesta ngawinkan anak, ada yang kerna menyekolahkan anak. Kalau saya ini menjual tanah itu kerna biaya anak belajar, sekolah. Yang beli itu orang Jawa. Banyak tanah saya di dalam itu dijual (Samin, wawancara, 28 Februari 2020).

Dua kutipan wawancara tersebut merupakan realitas interaksi antara masyarakat pendatang yang notabene mayoritas etnis Jawa dengan *ulun Lappung*. Proses migrasi pendatang di Kecamatan Sekampung Udik pada dasarnya berjalan dengan baik dan damai. Migrasi yang terjadi di Kecamatan Sekampung Udik tidak semata melalui program transmigrasi yang digagas pemerintah. Bahkan memiliki keunikan bahwa orang Lampung sendiri yang membawa masuk dengan menawarkan tanah untuk ditempati para pendatang. Meskipun pada beberapa kasus, para pendatang diberikan tempat menginap dan lahan pertanian untuk disewa. Setelah panen, maka hasil panen dibagi dua sekaligus ditabung yang pada masa berikutnya digunakan untuk membeli lahan sendiri (Latif, wawancara, 10 Februari 2020).

Penerimaan yang baik *ulun Lappung* terhadap pendatang ini bukan sesuatu yang asing bagi budaya adat Lampung. Salah satu pilar *piil pesenggiri* yaitu *sakai sambayan* merupakan modal budaya inklusif yang dimiliki *ulun Lappung*. Dengan kata lain, falsafah ini tidak hanya bersifat profan dan sakral belaka, akan tetapi benar-benar diejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga mereka mau menolong saudara-saudaranya yang sedang dalam kesusahan mencari penghidupan di tanah perantauan.

Jika ditafsirkan secara mendalam, pemberian tanah ulayat secara sukarela kepada para pendatang adalah bentuk *sakai*—yaitu memberikan sesuatu kepada seseorang atau kelompok orang dalam bentuk benda dan jasa yang bernilai ekonomis yang dalam prakteknya cenderung menghendaki saling berbalas. Sikap demikian sekaligus juga bentuk *sambayan* seseorang, karena memberikan sesuatu kepada orang lain—baik secara personal ataupun kelompok dengan tujuan untuk kepentingan umum—pemberian ini secara sosial dapat berbentuk benda dan jasa tanpa mengharapkan balasan.

Sakai Sambaian merupakan perwujudan sebuah kewajiban seseorang untuk berjiwa sosial, gotong royong, berbuat baik terhadap sesamanya—meski dalam prakteknya orang tersebut menerima imbalan jasa atau tidak. Tidak hanya pemberian lahan garapan bagi para pendatang yang umumnya dari etnis Jawa, pembuatan jalan penghubung untuk mempermudah akses transportasi sekaligus interaksi sosial pun juga merupakan hibah dari tanah pribadi *ulun Lappung*. Seorang tokoh adat Desa Bojong bertutur demikian:

Jalan yang ke Tanjung Harapan dari Bandar Agung Salai sampai ke Pugung yang malang itu, itu melewati tanah orang Lampung tidak beli itu. Dihadiahkan untuk jalan. Kerna saya yang ngaturnya. Satu kerna istilah sakai sambaian, kedua saya katakan itu amal hadiah. Nanti di ahirat kita disediakan Tuhan jalan kerna kita di dunia ini merelakan tanah tempat kita untuk jalan. Tuhan menyediakan kita jalan di akhirat nanti. Kata saya gitu. Sehingga masyarakat itu rela (Samin, wawancara, 3 Maret 2020).

Sakai Sambaian dapat juga diterjemahkan sebagai bentuk nilai kearifan budaya dalam sikap akseptabilitas terhadap sesama manusia. *Sakai sambaian* bertopang kuat dengan konsepsi agama tentang pembalasan atas nilai kebajikan. Bentuk kerelaan terhadap lahan yang tidak sedikit untuk pembuatan akses jalan dalam penuturan tokoh adat tersebut sebagai upaya manusia untuk menanam benih kebajikan untuk dapat memperoleh jalan yang diberikan Tuhan ketika di akhirat kelak.

Terlihat pada masa awal perjumpaan kedua etnis; antara *ulun Lappung* dengan masyarakat Jawa sama-sama memiliki modal sosial yang tinggi. Keduanya memiliki nilai-nilai falsafah hidup yang saling bersinergi, sehingga memudahkan keduanya untuk beradaptasi, berkomunikasi, dan berinteraksi (Muzakki, 2014: 96-97). Namun pada fase sejarah berikutnya, komunikasi budaya *ulun Lappung*-masyarakat Jawa memperlihatkan identitas etnis dijadikan sebagai alat kontestasi sosial dalam bentuk modus kami (*we-object*), dan bukan dalam bentuk modus kita (*we-subject*). Konsepsi antara diri (*self, al-ana*) dan yang lain (*other, al-akhar*) kemudian secara tegas dipraktikkan dalam wujud nyata kehidupan bersama. Identitas digunakan sebagai suatu label untuk mengelompokkan serta membedakan diri (*self*) dengan yang lain (*other*) (Sokefeld, 1999: 420). Kontestasi identitas antar etnis menjadi salah satu bentuk kontestasi dalam dunia sosial. Kontestasi ini berupa perjuangan memperoleh harga diri dan kehormatan dalam dunia sosial yaitu antara mereka sendiri (*insider*) dengan kelompok *liyan* (*outsider*) (Bourdieu, 1977: 15). Bagi *ulun Lappung*, mereka mengalami proses pemarginalan penduduk setempat di tanah kelahirannya yang membuat mereka tidak berkuasa atas lahan, atau disebut dengan istilah etnifikasi (Oommen, 1997: 18). Artinya, migrasi dan para migrannya telah membuat etnis lokal menjadi minoritas di daerah sendiri yang secara simbolik merupakan tanah tumpah darah. Pada posisi ini *ulun Lappung* menjadi resisten terhadap dominasi pendatang.

Lebih lanjut, sumberdaya memang sangat terbatas, –apalagi menyangkut lahan– sehingga harus diperebutkan. Perebutan sumberdaya alam antara *ulun Lappung* dengan masyarakat Jawa menjadi sebuah keniscayaan. Realitas ini tidak dapat dihindari melahirkan kontestasi antar etnis pada banyak aspek kehidupan. Pada dasarnya, kontestasi sumberdaya yang positif akan melahirkan kemajuan sebuah tatanan masyarakat dengan beragam kreatifitas baik secara individu maupun kolektif. Namun, ketika kontestasi yang berlangsung bersifat negatif berakibat semakin memperkuat sikap eksklusif dari primordialisme yang kemudian membuat garis tegas antara “kita” dan “mereka” yang berbeda etnis. Bahkan tidak jarang terjadi, garis tegas tersebut dipertebal dengan upaya memupuk dan mempertahankan rasa kebencian pada identitas kelompok etnis yang menjadi saingan. Realitas tersebut semakin terpengaruh oleh adanya anggapan kelompok etnis lain sebagai ancaman. Sebagaimana disebutkan oleh informan dari etnis Jawa berikut:

Yang jelas dari dulu dia memang semboyannya, suku...suku pendatang ini...suku penjajah..orang Jawa ini penjajah, orang Jawa ini hanya numpang...di Lampung, numpang...kan kami gak terimanya kan di situ...dulu sempit ukur-

ukuran lemah, mas..kita beli udah sertifikat sah, tetep kena duit...udah lima tahun yang lewat....(AG, wawancara, 3 Maret 2020).

Aku pernah, begini ceritanya. Mainlah ke tempat kawan, ada kenal lah. Jadi, istilahnya nggendong anaknya, apa ngudang, ia bilang kayak gini: “Wong Jowo kayak asu, wong Jowo musuhmu.” Apa gak....? Iya, depan mata saya, makanya semboyan dia kan, suku kami kan, suku penjajah, kan rata-rata mayoritas banyak Jawa yang sukses. Jadi, suku kami suku penjajah (IM, wawancara, 4 Februari 2020).

Prejudice sosial sebagai “penjajah” mengemuka tidak hanya pada ranah individual, namun bersifat massif. Dilihat dari segi komposisi masyarakat Jawa dan Lampung, memang untuk wilayah Kecamatan Sekampung Udik—begitu juga wilayah lainnya di Lampung— kuantitas etnis Jawa memang lebih banyak. Penguasaan sumberdaya di bidang ekonomi, pertanian, perkebunan, dan peternakan memang lebih banyak dimainkan oleh etnis Jawa. Etos kerja yang dimiliki masyarakat pendatang memang berbanding terbalik dengan etos masyarakat asli. Penguasaan lahan, sedikit-demi sedikit mulai mengalami pergeseran dari *ulun Lappung* ke masyarakat pendatang. Kenyataan dari peta wilayah Kecamatan Sekampung Udik memperlihatkan bahwa permukiman etnis Jawa semakin meluas dan bersifat menyisir ke arah pusat dan menyisakan ruang yang semakin sempit bagi *ulun Lappung*. Konflik agraria antar-etnis kemudian menjadi sebuah keniscayaan.

Konflik agraria antara *ulun Lappung* dengan masyarakat pendatang, khususnya etnis Jawa merupakan fenomena yang sudah “lazim”. Sistem jual beli lahan yang dilakukan secara tradisional pada masa lalu tanpa bukti surat menyurat menjadi salah satu faktor konflik ini terjadi. Begitu juga ukuran lahan yang tidak memiliki batasan yang jelas pada saat transaksi di masa-masa awal pembukaan lahan. Ataupun disebabkan gugatan dari ahli waris sebagai generasi berikutnya yang tidak sepenuhnya mengetahui adanya transaksi lahan yang telah dilakukan (NA, wawancara, 26 Februari 2020). Eskalasi konflik agraria yang tinggi menyebabkan luka sosial antar etnis baik pada skala individu maupun kelompok. Pengalaman konflik agraria ini terjadi baik yang ada di Kecamatan Sekampung Udik maupun wilayah lainnya di Lampung.

Realitas munculnya *prejudice*, konflik agraria, diperparah dengan pengalaman-pengalaman individu atau kelompok dalam bentuk perebutan sumberdaya lainnya. Prasangka (*prejudice*) dan berbagai pengalaman individu atau kelompok yang telah lama berkembang antara kedua etnis tersebut kemudian melahirkan stigma dalam masyarakat Jawa yang berujung pemberian label terhadap etnis Lampung. Pemberian label dari satu etnis terhadap etnis lainnya dalam konsep sosiologi disebut *labeling*. Pelabelan yang bersifat negatif dalam ranah sosial merupakan implikasi dari *stereotype* dan stigma yang terbentuk dalam sebuah komunitas. Ada beragam pemberian label yang disematkan etnis Jawa terhadap masyarakat Lampung. Sebaliknya, masyarakat Lampung pun kemudian memberikan *counter-label* terhadap masyarakat Jawa.

Pada saat individu atau kelompok masyarakat berinteraksi dengan orang lain atau komunitas lain lintas etnik atau lingkungan di luar komunitasnya, membawa orang tersebut untuk melakukan beberapa alternatif tindakan. Posisi situasi ini akan menentukan bentuk interaksi yang dilakukan. Tindakan yang dipilih pada dasarnya adalah bentuk dari penyesuaian. Pola penyesuaian dapat bersifat positif atau negatif. Pola penyesuaian yang positif berujung pada pembentukan sistem kehidupan bersama yang saling mencipta harmoni. Di antaranya adalah pola adaptasi budaya dan

manipulasi identitas dalam konteks komunikasi antar-budaya. Proses ini melahirkan kemampuan mengikuti situasi yang dihadapi termasuk bahasa, sikap, maupun perilaku. Terbentuk upaya penerimaan dari kedua belah pihak yang berinteraksi. Tercipta komunikasi antar-budaya yang saling memahami dalam konteks budaya masing-masing. Manipulasi identitas dilakukan dengan menempatkan diri pada posisi lawan berkomunikasi, bersikap sopan dan deskriptif, bersikap positif, serta menghindari prasangka dan etnosentrisme. Sementara pola penyesuaian negatif melahirkan kontestasi antar kelompok dengan sikap pembentukan garis tegas pemisah antar komunitas. Proses komunikasi antar-budaya dengan upaya mempertahankan secara *rigid* identitas ke-etnik-annya. Etnosentrisme menjadi sentral dalam interaksi sosial yang terjadi. Pada pola ini, tercipta pemikiran yang bersifat *stereotype*, prasangka, perasaan ketidak-pastian, kecemasan, atau perasaan sikap diskriminasi dari budaya di luar dirinya. Dari sinilah terlihat bahwa unjuk identitas dalam ranah sosial yang memiliki keragaman akan menimbulkan beberapa kemungkinan, yaitu antara manipulasi identitas, mempertahankan, atau mengikuti situasi di mana konteks itu terjadi.

Setiap etnik memiliki perbedaan dalam memandang identitas, tergantung pada orientasi budaya kolektifis maupun individualis. Pola yang digunakan dalam komunikasi antar-budaya dengan cara manipulasi identitas sebagai suatu proses peniruan budaya baru. Manipulasi identitas dimaksud seperti dalam komunikasi dengan penggunaan bahasa etnis lain. Begitu juga peniruan dialek, intonasi, dan berbagai ungkapan ciri khas budaya setempat. Hal ini dapat dilakukan ketika antar budaya membaaur dalam interaksi yang berkesinambungan. Melalui komunikasi antar budaya yang efektif, berkesinambungan antara dua etnik yang berbeda akan membentuk sistem sosial positif dalam interaksi yang dilakukan.

Komunikasi budaya yang terjadi antara kelompok etnis-Lampung dengan Jawa terbentuk berdasarkan ciri yang ditentukan oleh masing-masing kelompok. Pada tahap selanjutnya, membentuk pola tersendiri dalam proses komunikasi dengan sesamanya. Proses yang mempengaruhi pembentukan dan bertahannya masing-masing identitas etnik tersebut. Terlihat adanya pergeseran bentuk komunikasi antar budaya yang dilakukan masyarakat Lampung. Perubahan identitas etnik ini memperkuat tesis yang menyatakan bahwa budaya adalah sistem makna (*system of meaning*) dengan titik tekan pada ide kognisi. Pada saat sistem makna yang berada dalam konteks tertentu mengalami perubahan, akan diikuti oleh perubahan sistem nilai (*system of value*) dari sebuah masyarakat.

Keberadaan masyarakat transmigran suku Jawa di Lampung secara umum dan Lampung Timur khususnya—dengan latar budayanya yang berbeda menyebabkan terjadinya proses sosial yang terjalin antara *ulun Lappung* dan suku Jawa. Namun, gejala semacam ini bagi sebagian penduduk lokal dianggap tidak bermakna sama dengan “penjajahan” dan akulturasi. *Ulu Lappung* tetap mampu menjadi dirinya sendiri dan dapat menjaga identitas budayanya sendiri. Sehingga *ulun Lappung* tidak terakulturasi oleh suku Jawa dan tidak menjadi penduduk kelas dua. Bahkan bagi sebagian *ulun Lappung*, identitas budaya mereka tidaklah luntur, justru sebaliknya cenderung lebih kukuh. Meski pada level kuantitatif, penduduk asli Lampung untuk saat ini telah menjadi penduduk minoritas. Dengan kata lain, *ulun Lappung*—secara geografis dan demografis—telah menjadi suku yang nomor dua di wilayahnya sendiri. Mereka hidup dalam lingkaran kehidupan masyarakat pendatang yang didominasi suku Jawa, akan tetapi sebagian penduduk lokal tetap teguh dalam memegang nilai-nilai

kebudayaan yang dimilikinya sehingga tidak terjadi proses akulturasi budaya, dan tetap menjadi penguasa dalam ranah sosial.

Terpinggirkannya masyarakat Lampung di tanah kelahirannya turut mengukuhkan ikatan primordialnya dengan model permukiman tradisional yang memperkuat sistem tertutup komunitas yang membatasi interaksi dengan etnis lain. Realitas ini memupuk semangat ujuk identitas untuk menampakkan jati diri di tanahnya sendiri. Ditunjang fakta bahwa secara kuantitas mereka semakin terpinggirkan. Semuanya berproses masing-masing, tanpa pembauran sebagai buah interaksi yang gagal, sehingga prasangka etnik semakin menebal dan masing-masing mencari saluran sebagai letupannya.

Tersekatnya struktur permukiman semakin mempertebal pemisah bagi interaksi sosial antar-etnis. Kontestasi identitas masing-masing etnis yang berujung pada segregasi sosial bahkan merambah wilayah ritual keagamaan sebagai sesama Muslim. Meskipun antara kedua etnis berada dalam satu kampung, masing-masing akan membangun masjid di wilayahnya yang tidak akan diakses oleh jamaah yang tidak satu etnis. Masyarakat Jawa tidak melaksanakan ibadah pada masjid yang dibangun dan berada di sekitar masyarakat Lampung. Begitu juga sebaliknya yang dilakukan masyarakat Lampung. Walau jarak sebuah masjid misalnya, berdekatan dengan tempat tinggal seorang Jawa, ia akan lebih memilih untuk beribadah di masjid mayoritas Jawa yang berjarak lebih jauh dari tempat tinggalnya. Seorang informan warga Lampung asli menyatakan sebagai berikut:

...tempat saya, Lampungnya cuman 30%, sisanya Jawa. Yang tiga puluh persen itu letaknya di satu dusun sendiri. Terus ada mesjid sendiri. Nah, orang Jawa di dekat mesjid gak pernah ke mesjid Lampung. Padahal jaraknya dekat. Apalagi yang beda dusun, terus jarak antar dusun agak jauh. Kalau lebaran, orang Jawa biasanya main ke tempat orang-orang Lampung. Biasanya malah rame-rame. Tapi, orang Lampungnya sendiri gak pernah main lebaran ke tempat orang Jawa (VC, wawancara, 26 Februari 2020).

Begitu juga hubungan antara identitas agama dengan identitas lainnya. Identitas agama secara umum akan melingkupi identitas yang cakupannya lebih kecil, termasuk identitas etnik. Maksudnya bahwa identitas kesukuan secara otomatis akan terlingkupi oleh identitas keagamaan. Identitas sebagai etnis Lampung, Jawa, Sunda akan terlingkupi oleh identitas sebagai seorang Muslim atau sesama pemeluk agama Islam. Namun demikian, pemintalan identitas atas nama agama pada dua komunitas Jawa dan Lampung yang mayoritas beragama Islam belum secara maksimal teraplikasikan dalam ranah sosial.

Padaahal secara organisasi keagamaan, kedua komunitas lebih berorientasi sama. Menurut pengamatan tim peneliti, praktik keagamaan yang diperlihatkan masyarakat Jawa dan Lampung di wilayah Kecamatan Sekampung Udik bercirikan tradisi Nahdhatul Ulama. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk membuktikan hal ini. Tradisi keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat dengan ciri praktik keagamaan organisasi keagamaan NU, memang tidak serta merta dapat dinyatakan bahwa masyarakat tersebut berafiliasi secara keorganisasian pada NU. Sebab banyak kasus bahwa satu kelompok masyarakat melakukan tradisi keagamaan yang bercirikan NU namun tidak mengidentifikasikan dirinya secara keorganisasian pada afiliasi NU. Meskipun demikian, kesamaan tradisi keagamaan yang ada pada kedua komunitas tersebut seperti *yasinan* dan *tahlilan* dapat dijadikan sebagai modal sosial dalam membangun hubungan harmonis dan komunikasi antar-budaya yang lebih positif.

Tidak hanya pada ritual keagamaan, bahkan segregasi sosial pun terjadi pada aktivitas yang bersifat nasional seperti acara HUT RI. Kesempatan perjumpaan sosial yang lentur dalam bentuk berbagai perlombaan pada saat hari kemerdekaan pun tidak dapat menjalin interaksi sosial pemuda antar-etnis. Begitu pula berbagai kegiatan yang difasilitasi oleh pihak kampung. Fragmentasi struktur sosial antara masyarakat Jawa dengan etnis Lampung memperlihatkan komunikasi sosial yang terhambat. Komunikasi sosial tersebut terjadi hampir di semua lini termasuk bidang pendidikan. Sehingga pemusatan *enclave* dengan basis kesukuan sangat mencolok di tingkat struktur sosial.

KESIMPULAN

Pembentukan identitas *ulun Lappung* dilakukan melalui transfer nilai kultur adat Lampung yang tidak terlepas dari nilai-nilai yang telah diwariskan oleh generasi sebelumnya. Transfer nilai dilakukan pada ranah individu, keluarga, dan komunitas sosial. *Piil Pesenggiri* merupakan salah satu konsep pembentukan karakter atau menata diri dan kelompok masyarakat bagi *ulun Lappung*. *Piil pesenggiri* meliputi lima asas filosofis: *juluk-adok*, *nemui nyimah*, *nengah nyappur*, *sakai sambaian*, dan *ragom mufakat*. *Ulun Lappung* memiliki keterhubungan dengan adat Lampung yang sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks interaksi sesama masyarakat Lampung, mereka tetap menjaga tradisi termasuk bahasa lokal sebagai simbol untuk memelihara identitas ke-Lampung-annya. Komunikasi antar-budaya dengan kultur Jawa tidak terjadi dan mempengaruhi eksistensi budaya Lampung, bahkan komunikasi yang negatif dengan masyarakat Jawa membuat identitas Lampung semakin mengental dan mengarah pada primordialisme. Dengan kata lain, terjadi proses *bonding* ke dalam baik secara individu dan kolektif dan ikatan interaksi sesama *ulun Lappung* menjadi sangat kuat.

Konstruksi identitas *ulun Lappung* dalam kontestasi sosial antar etnik dengan masyarakat pendatang memperlihatkan model defensifikasi identitas. Tidak terjadi modifikasi, manipulasi, ataupun asimilasi identitas ketika bertemu dalam ranah sosial dengan masyarakat pendatang. Kontestasi antar-etnis Lampung dan Jawa mengarahkan *ulun Lappung* untuk melakukan pembentukan identitas baru. Identitas tersebut berupa identitas perlawanan (*resistence identity*). Proses konstruksi tersebut berasal dari pengalaman individual maupun kolektif yang bersifat negatif pada saat interaksi sosio-kultural dengan masyarakat pendatang. Konstruksi identitas perlawanan ini dapat dilihat dari kawasan permukiman, penamaan wilayah, kegiatan keagamaan, interaksi sosial, pendidikan, dan pembentukan organisasi primordial informal.

REKOMENDASI

Berdasarkan temuan penelitian, ada beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan sebagai kebijakan pihak terkait, yaitu:

1. Jalur institusi keagamaan melalui melibatkan berbagai pihak dapat dijadikan pintu masuk untuk membangun komunikasi positif antara *ulun lappung* dan masyarakat pendatang. Maksudnya bahwa dari temuan lapangan, terlihat tradisi keagamaan dari kedua komunitas memiliki kesamaan, yaitu sama-sama berafiliasi pada tradisi keagamaan NU, baik secara keorganisasian maupun bersifat informal. Tradisi keagamaan NU yang berbasis pembangunan umat melalui pendekatan kultural dapat dijadikan *imagine moment* yang mempersatukan kedua etnis. Realitas inipun dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi penyusunan kebijakan IAIN Metro dalam program pemberdayaan masyarakat yang terpadu. Wilayah

penelitian dapat dijadikan *locus* bagi pembentukan laboratorium sosial dengan basis pendidikan harmoni.

2. Kelompok-kelompok informal di masyarakat Lampung harus dilihat sebagai modal sosial untuk menjalin kohesi dan asimilasi dalam interaksi sosial. Kelompok ini akan sangat resisten terhadap pendekatan politis dan kepentingan politik sesaat. Meskipun bermula dari rasa primordialisme, namun keanggotaan kelompok ini dapat dijadikan modal pembentukan identitas kebangsaan.
3. Adanya pergeseran pola ekonomi dalam masyarakat Lampung dari sistem perkebunan *ansich* kepada aspek pertanian seperti singkong maupun penanaman semangka yang semula hanya berperan sebagai pemilik lahan yang menyewakan lahan, kemudian bergeser pada sistem mitra, hingga upaya penanaman sendiri memperlihatkan adanya komunikasi dan proses saling belajar antar etnis. Komunikasi antar-budaya yang positif ini harus dilihat sebagai sarana sosial dalam pengembangan berbagai kebijakan untuk mempertemukan dan memupus sekat budaya. Proses saling belajar dan mempelajari antar-kebudayaan harus ditingkatkan tidak hanya dalam *scope* individual, namun juga bersifat massif-kolektif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih tim peneliti sampaikan kepada para tokoh adat, tokoh masyarakat dari Marga Sekampung Udik Limo Megou di Wilayah Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Begitu juga para kolega yang memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat berharga. Terkhusus peneliti sampaikan terima kasih kepada Institut Agama Islam Negeri Metro yang telah membiayai proses penelitian ini sampai dengan selesai dan dapat diterbitkan di Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Artikel ini merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Tim yang diketuai oleh Wahyu Setiawan, sementara Sainul dan Aprida Kurnia Lestari sebagai anggota. Proses awal berupa penyusunan proposal, penggalan data lapangan, transkripsi wawancara, kategorisasi dan Sanalisis data, hingga penyajian data dilaksanakan secara teamwork.

REFERENSI

- Adha, Muhammad Mona dkk. "Enhancing Social Cohesion where Festival as a Media, is it Possible?." *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Vol. 251, 2018.
- Appiah, Kwame Anthony. *The Ethics of Identity*. Princeton: Princeton University Press, 2005.
- Bakker, Chris. *Cultural Studies: Teori dan Praktek*. Alih bahasa Noorhaidi. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Bhabha, Homi K. *The Location of Culture*. London dan New York: Routledge, 1994.
- Brinks, Daniel M. "Access to What? Legal Agency and Access to Justice for Indigenous Peoples in Latin America." *The Journal of Development Studies*, Vol. 55, No. 3, 2019.
- Burke, Peter J. dan Jan E. Stets. *Identity Theory*. New York: Oxford University Press, 2009.

- Castells, Manuel. *The Information Age: Economy, Society, and Culture, Vol I: The Rise of the Network Society*. Oxford: Blackwell, 2000.
- . *The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World*. Basingstoke and New York: Palgrave-Macmillan and Guilford Books, 2003.
- Côté, James E. dan Charles G. Levine. *Identity Formation, Agency, and Culture*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2002.
- Fitriani, Cicik. "Interaksi Sosial Transmigran Jawa dengan Masyarakat Lokal di Desa Kayuagung Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Motong." *e-journal Geo-Tadulako UNTAD*, 2014.
- Haliim, Wimmy. "Harmony and Tolerance as a *Tengger* Identity: Reflections for Indonesian Identity and Unity Degradation." *International Journal of Social Sciences*, 1 (1), 2018.
- Halimatusa'diah. "Betawi Punye Distro: Strategi Perlawanan terhadap Stereotip Inferior." *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Vol. 21, 2019.
- Haviland, William A. et al. *Anthropology The Human Challenge* edisi ke-13. Belmont: Wadsworth, 2011.
- Hogg, Michael A. dan Dominic Abrams. *Social Identity Theory: Constructive and Critical Advances*. New York: Springer-Verlag, 1990.
- Hornsey, M. J. "Social Identity Theory and Self-categorization Theory: A Historical Review." *Social and Personality Psychology Compass*, 2/1, 2008.
- Humaedi, M. Alie. "Kegagalan Akulturasi Budaya dan Isu Agama dalam Konflik Lampung." *Analisa*. Vol. 21 No. 02 Desember 2014.
- Irham, Muhammad Aqil. "Lembaga Perwatin dan Kepunyeimbangan dalam Masyarakat Adat Lampung: Analisis Antropologis." *Analisis*, Vol. XIII, Nomor 1, Juni 2013.
- Irianto, Sulistyowati. "Piil Pesenggiri: Modal Budaya dan Strategi Identitas Lampung." *Humaniora*. Vol. 15. No. 2, 2011.
- Kurniadi, Akbar, Tri Legionosuko, Wibisono Poespitohadi. "Conflict Transformation Between Balinese and Lampung Ethnic in Realizing Sustainable Peace in Balinuraga Village, Way Panji District, Lampung Selatan Regency." *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Vol. 9, No. 1, April 2019.
- M'Cormack, Freida. "Prospects for Accesing Justice for Sexual Violence in Liberia's Hybrid System." *Stability: International Journal of Security & Development*, 7 (1), 2018.
- Muzakki, Ahmad. "Memperkenalkan Kembali Pendidikan Harmoni Berbasis Kearifan Lokal (*Piil Pesenggiri*) pada Masyarakat Lampung." *Penamas: Jurnal Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 30, Nomor 3, Oktober-Desember 2017.
- Ningrum, Ayu Reza, Sudjarwo, Pargito. "Social Interactions between Javanese Ethnic Group and Balinese Ethnic Group." *Jurnal Historia*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2018.
- Rumkel, Lutfi, Belinda Sam, MCB Umanailo, "Village Head Partnership, Village Consultative Body and Customary Institution in Village Development." *International Journal of Scientific & Technology Research* Vol. 8, 2019.
- Sokefeld, M. "Debating Self, Identity, and Culture in Anthropology." *Current Anthropology*, 40(4), 1999.
- Tajfel, Henry. "Social Psychology of Intergroup Relations." *Annual Reviews of Psychology*. Annual Reviews, 1982.

Utama, Fitra. "Piil Pesenggiri dalam Masyarakat Lampung: Antara Instrumen Bina Damai atau Dalih Kekerasan." *Inovasi Pembangunan-Jurnal Kelitbangan*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2019.

Valentina, Annisa. "Kontestasi Gelar Adat "Suttan" dalam Panggung Politik Lampung." *JISPO*, Vol. 8, No. 2, Juli-Desember 2018.

Wahab, Oki Hajiansyah, HS Tisnanta, Rahayu. "Forest Register 45 Mesuji Lampung: Agrarian Conflict, Social Exclusion and Human Rights Violations." *Environmental Policy and Law*, 48/5 (2018).

Copyright Holder :

© Wahyu Setiawan, Sainul Sainul, Aprida Kurnia Lestari, (2024).

First Publication Right :

© Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah

This article is under:

CC BY SA